

Pertanggungjawaban hukum kurator atas kesalahan pengelolaan dan pemberesan harta pailit dalam kondisi kedudukan hukum direksi dalam perseroan terbatas sebagai debitor pailit studi kasus: kurator PT. Puri Nikki V. direksi PT. Puri Nikki = Legal responsibilities of a bankruptcy trustee for errors in arrangement and ordering of bankruptcy treasures in the legal position of the board of directors in a limited liability company as a bankruptcy debtor : case study PT Puri Nikki's bankruptcy trustee v. board of directors of PT Puri Nikki

Jacinta Azalea Hapsari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20466457&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengelolaan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam hukum pidana, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai posisi Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, sebagai organ yang menjalankan pengelolaan Perseroan Terbatas pada umumnya. Kemudian dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih relevan.

.....

This thesis tries to examine and discuss about the responsibility that can be charged to the Bankruptcy Trustee's own asset if there is a mistake in his duty to arrangement and ordering the bankrupt property as regulated in Article 72 of Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. This is discussed by looking at the theories of error that are used as positive law in Indonesia, as in criminal law, because of Law no. 37 of 2004 does not provide further explanation and regulation regarding the accountability for the mistakes made by the Bankruptcy Trustee in carrying out the task of managing and securing the bankruptcy property. In this thesis will also be discussed about the position of the Board of Directors in a Limited Liability Company that has been declared bankrupt, as an organ that runs the management of Limited Liability Company in general. Then in this thesis will analyze the decision of Commercial Court in Surabaya District Court to be more relevant.